ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil *library research* dengan metode penelitian kualitatif yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana parameter untuk menetapkan Perpu oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa serta Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat penetapan Perpu oleh Presiden.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah *deskripstif-analitis*. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas permasalahan tentang penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam hitungan hari yang telah menimbulkan disharmoni antara eksekutif dan legislatif, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori konsep darurat dalam hukum islam serta parameter kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu menurut pakar hukum tata negara kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama,* Parameter untuk menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan memaksa yaitu apabila di suatu negara terjadi kekosongan hukum; adanya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*) baik dari dalam ataupun luar yang akan mengancam eksistensi / keberlangsungan suatu negara; adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*) dimana Presiden harus segera melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan pemerintahan; adanya unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia, dengan keterbatasan waktu tersebut Presiden harus bertindak dengan cepat dan tepat untuk mengeluarkan kebijakan, untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat darurat diperlukan solusi yang lebih besar dari bahaya tersebut supaya bahaya yang terjadi di suatu negara bisa dihapuskan atau ditekan dengan upaya yang lebih besar; dan/atau adanya keadaan yang mendesak (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. *Kedua,* Islam memberikan kelonggaran untuk berijtihad menemukan suatu hukum / membuat peraturan untuk menyelematkan keberlangsungan suatu negara apabila terjadi keadaan darurat yang dasarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, kelonggaran yang diberikan oleh Islam tentunya juga masih dibatasi oleh syari'at serta untuk kemaslahatan seluruh umat.
Dari simpulan tersebut hendaknya Presiden tidak boleh menyalahgunakan kewenangan istimewa dibidang legislasi untuk menerbitkan Perpu. Apalagi membatalakan undang-undang dengan Perpu dalam hitungan hari. Karena kesewenangan akan menimbulkan kediktatoran dan alangkah baiknya jika DPR bersama Presiden membuat peraturan/pakem yang jelas mengenai parameter kegentingan memaksa supaya ketentuan "dalam hal ihwal kegentingan memaksa" bisa dipandang obyektif oleh semua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id